

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Adi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Cetakan Ke-1, (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Bayu Dwi Anggono, Dkk., *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*, Edisi 1, Cetakan Ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2022).
- Bernard L Tanya Dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publisng, 2013).
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press).
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, (Medan: Manhaji, 2020).
- Galang Asmara, *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020).
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).
- Isharyanto, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016).
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Jazim Hamidi, Dan Charles Christian, *Et.Al., Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Kontitusialisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Jhon Kenedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Midran Dylan, Dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian: Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: BPSDM KUMHAM Press, 2020).
- \_\_\_\_\_, *Pengawasan Keimigrasian*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Paramarta, Y. Ambeg, Dkk., *Upaya Jajaran Keimigrasian Dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa*, Cetakan Pertama, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI– November 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan ke-9, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014).
- Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).
- Rahmawati Sururama Dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: Cendikia Press, 2020).
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke 16 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana. 2018).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2016).
- Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).
- Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (Sop) Penulisan Tugas Akhir Tesis*, (Jakarta: Universitas, 2022).
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Yopi Gunawan Dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
- Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016).

#### **Jurnal:**

- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi : 59, ISSN : 1829-7463, 2019.
- M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2020, Page 142-159.
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang

diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Timbul Aman Simorangkir, "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 1, Februari 2016.

Olyvia Sindiawaty, "Kebijakan Tindak Adminstratif Keimigrasian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia", *Journal Of Law and Border Protection*, Volume 2, Nomor 2, 2020.

Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019: 33 – 54.

Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Journal of Rural and Development*, Volume III Nomor 2, 2012.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, pengamanan keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

**Website/Internet.**

Bintang Pradewo, "Kantor Imigrasi Jakarta Timur Dukung Program Penguatan Pengawasan WNA".  
<https://www.jawapos.com/jabodetabek/19/01/2022/kantor-imigrasi-jakarta-timur-dukung-program-penguatan-pengawasan-wna/>, diunduh tanggal 20 Maret 2022.

Fenny Julita, "Peningkatan Sistem APOA, Memaksimalkan Pengawasan Orang Asing". <https://www.antarane.ws.com/berita/2642793/peningkatan-sistem-apoa-memaksimalkan-pengawasan-orang-asing>, diakses tanggal 19 Maret 2022.

Feri Gautama, "Operasi Gabungan Timpora Wilayah Jakarta Timur di Apartemen Bassura City". <https://jakarta.kemerkumham.go.id/berita-keimigrasian/operasi-gabungan-timpora-wilayah-jakarta-timur-di-apartemen-bassura-city>, diakses tanggal 22 Maret 2022.

Ibnu Hariyanto, "Kantor Imigrasi Jaktim Deportasi 107 WNA Sepanjang 2017". <https://news.detik.com/berita/d-3777132/kantor-imigrasi-jaktim-deportasi-107-wna-sepanjang-2017>, diakses tanggal 20 Maret 2022.

Jpnn.com, "Gelar Razia Warga Asing, Kantor Imigrasi Jaktim Temukan Pelanggaran". <https://www.jpnn.com/news/gelar-razia-warga-asing-kantor-imigrasi-jaktim-temukan-pelanggaran>, diakses tanggal 20 Maret 2022.

Tim kumparan news, "Imigrasi Jaktim Perkuat Pengawasan dan Pemeriksaan WNA, <https://kumparan.com/kumparannews/imigrasi-jaktim-perkuat-pengawasan-dan-pemeriksaan-wna-1xL8KH68XmM/full>, diakses tanggal 20 Maret 2022.